



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG INVESTIGASI**

Gedung BPKP Pusat Lantai 9, Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120
Telepon 021-85910031 Ext. 0327/, Faksimile 021-85906467

Nomor : LKIN- 11 /D5/01/ 2017 19 Juli 2017
Lampiran : 2 halaman
Hal : Laporan Kinerja Deputi Bidang
Investigasi Triwulan II Tahun 2017

Yth. Kepala BPKP

di

Jakarta

Dengan ini kami sampaikan Laporan Evaluasi Kinerja Deputi Bidang Investigasi Triwulan II Tahun 2017. Capaian kinerja triwulan II tahun 2017 merupakan perbandingan realisasi dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja triwulan II tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja

1. Sasaran Strategis

Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

IKU 1 Indeks akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan program prioritas dalam nawacita (indeks APKPN, skala 1-5) pada triwulan II belum ditetapkan pencapaiannya.

2. Sasaran Program

a. Meningkatkan efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian

- 1) IKU 1.1. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian dimanfaatkan di persidangan.

Persentase hasil pengawasan keinvestigasian dimanfaatkan di persidangan adalah tingkat pemanfaatan laporan hasil pengawasan keinvestigasian berupa Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Keugian Keuangan Negara (LHPKKN) dan Laporan Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Dokumen Elektronik (LPEBDE) pada sidang di pengadilan. Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah laporan hasil pemberian keterangan ahli di pengadilan dibandingkan

dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dan Laporan Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Dokumen Elektronik (LPEBDE) yang diterbitkan.

Realisasi kinerja triwulan II tahun 2017 sebesar 27,34% atau mencapai 68,35% dari target tahun 2017 sebesar 40%. Realisasi kinerja dihitung berdasarkan jumlah laporan hasil pemberian keterangan ahli di pengadilan dibandingkan dengan jumlah Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dan Laporan Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Dokumen Elektronik (LPEBDE) yang diterbitkan yaitu 362 laporan dibandingkan 1.324 laporan.

Capaian sasaran program ini didukung oleh penugasan pemberian keterangan ahli, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dan Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Dokumen Elektronik (PEBDE) yang dilaksanakan oleh Direktorat di lingkungan Deputi Bidang Investigasi dan Perwakilan BPKP.

- 2) IKU 1.2. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH.

Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) adalah tingkat pemanfaatan hasil audit investigatif oleh APH. Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah laporan hasil audit investigatif yang dapat ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh APH dibandingkan dengan jumlah laporan hasil audit investigatif yang diterbitkan.

Realisasi kinerja triwulan II tahun 2017 sebesar 10,00% atau mencapai 14,29% dari target tahun 2017 sebesar 70%. Realisasi kinerja dihitung berdasarkan jumlah laporan hasil audit investigatif yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh APH dibandingkan dengan jumlah laporan hasil audit investigatif yang diterbitkan yaitu 3 laporan dibandingkan 30 laporan.

Capaian sasaran program ini didukung oleh penugasan pengawasan yang dilaksanakan oleh Direktorat di lingkungan Deputi Bidang Investigasi dan Perwakilan BPKP.

- 3) IKU 1.3. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K.

Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K adalah tingkat pemanfaatan laporan hasil pengawasan keinvestigasian berupa laporan hasil audit Investigatif, laporan hasil pengawasan atas *current issues*, dan laporan hasil pengawasan dalam rangka pemberian rekomendasi strategis oleh K/L/P/K untuk perbaikan tata kelola dan/atau mencegah TPK berulang. Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah laporan hasil pengawasan keinvestigasian berupa laporan hasil audit Investigatif, laporan hasil pengawasan atas *current issues*, dan laporan hasil pengawasan dalam

rangka pemberian rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh K/L/P/K untuk perbaikan tata kelola dan/atau mencegah TPK berulang dibandingkan dengan jumlah laporan hasil pengawasan keinvestigasian yang diterbitkan.

Realisasi kinerja triwulan II tahun 2017 sebesar 27,27% atau mencapai 45,45% dari target tahun 2017 sebesar 60%. Realisasi tersebut dihitung berdasarkan jumlah laporan hasil audit investigatif yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh K/L/P/K dibandingkan dengan jumlah laporan hasil audit investigatif yang diterbitkan yaitu 3 laporan dibandingkan 11 laporan.

Capaian sasaran program ini didukung oleh penugasan pengawasan yang dilaksanakan oleh Direktorat di lingkungan Deputi Bidang Investigasi dan Perwakilan BPKP.

- 4) IKU 1.4. Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K.

Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K adalah tingkat pemanfaatan hasil audit penyesuaian harga oleh penanggung jawab kegiatan atau pengguna barang/jasa untuk pengambilan keputusan penyesuaian harga. Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah laporan hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh penanggung jawab kegiatan atau pengguna barang/jasa dibandingkan jumlah laporan hasil audit penyesuaian harga yang diterbitkan.

Realisasi kinerja triwulan II tahun 2017 sebesar 100% atau mencapai 142,86% dari target tahun 2017 sebesar 70%. Realisasi kinerja dihitung berdasarkan jumlah laporan hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh penanggung jawab kegiatan atau pengguna barang/jasa dibandingkan jumlah laporan hasil audit penyesuaian harga yang diterbitkan yaitu 9 laporan dibandingkan 9 laporan.

Capaian sasaran program ini didukung oleh penugasan audit penyesuaian harga yang dilaksanakan oleh Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan dan Perwakilan BPKP.

- 5) IKU 1.5. Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K.

Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K adalah tingkat pemanfaatan hasil audit klaim oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi untuk pengambilan keputusan penyelesaian klaim. Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah laporan hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K dibandingkan jumlah laporan hasil audit klaim yang diterbitkan.

Realisasi kinerja triwulan II tahun 2017 sebesar 100% atau mencapai 142,86% dari target tahun 2017 sebesar 70%. Realisasi kinerja dihitung berdasarkan berdasarkan jumlah laporan hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K untuk pengambilan keputusan klaim

dibandingkan jumlah laporan hasil audit klaim yang diterbitkan yaitu 14 laporan dibandingkan 14 laporan.

Capaian sasaran program ini didukung oleh penugasan audit klaim yang dilaksanakan oleh Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan dan Perwakilan BPKP.

b. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional

IKU 2.1. Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan.

Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan adalah tingkat pemanfaatan hasil evaluasi hambatan kelancaran pembangunan untuk menyelesaikan masalah yang menghambat kelancaran program/kegiatan pembangunan. Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah Laporan Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) yang ditindaklanjuti kesepakatannya oleh para pihak dibandingkan jumlah Laporan Hasil EHKP yang diterbitkan.

Realisasi kinerja triwulan II tahun 2017 sebesar 100% atau mencapai 142,86% dari target tahun 2017 sebesar 70%. Realisasi kinerja dihitung berdasarkan jumlah Laporan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) yang ditindaklanjuti kesepakatannya oleh para pihak dibandingkan jumlah laporan EHKP yang diterbitkan yaitu 8 laporan dibandingkan 8 laporan.

Capaian sasaran program ini didukung oleh penugasan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) yang dilaksanakan oleh Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan dan Perwakilan BPKP.

c. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi

1) IKU 3.1. Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP.

Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA) adalah tingkat penyelesaian penugasan *Fraud Control Plan* (FCP) termasuk *Fraud Risk Assessment* (FRA) baik atas permintaan K/L/P/K dan inisiatif sendiri pada salah satu dari tahapan:

- a. Sosialisasi
- b. *Diagnostic Assessment*
- c. Bimbingan Teknis Implementasi
- d. Evaluasi
- e. Monitoring

yang dapat ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh K/L/P/K.

Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP dibandingkan dengan jumlah penugasan FCP dilaksanakan (Sosialisasi + *Diagnostic Assessment* + Bimbingan Teknis Implementasi + Evaluasi + Monitoring) termasuk FRA.

Realisasi kinerja triwulan II tahun 2017 sebesar 61,54% atau mencapai 123,08% dari target tahun 2017 sebesar 50%. Realisasi kinerja dihitung berdasarkan jumlah Laporan K/L/P/K yang mengimplementasikan

FCP termasuk FRA dibandingkan dengan jumlah penugasan FCP yang dilaksanakan yaitu 8 laporan dibandingkan 13 laporan.

Capaian sasaran program ini didukung oleh penugasan FCP termasuk FRA yang dilaksanakan oleh Direktorat di lingkungan Deputi Bidang Investigasi dan Perwakilan BPKP.

- 2) IKU 3.2. Persentase auditor yang memiliki kompetensi (*hard & soft competency*) di bidang pencegahan.

Persentase auditor yang memiliki kompetensi (*hard and soft competence*) di bidang pencegahan, yaitu kompetensi untuk melakukan kegiatan *Fraud Control Plan (FCP)*, *Fraud Risk Assesment (FRA)*, Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK), dan Penilaian Budaya Organisasi Anti Korupsi (PBOAK). Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah auditor yang sudah pernah (berpengalaman) melakukan FCP/FRA/MPAK/PBOAK kepada K/L/P/K dibandingkan dengan jumlah seluruh auditor.

Sampai dengan triwulan II tahun 2017 belum ada realisasi kinerja program ini.

d. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi.

IKU 4.1. Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat.

Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat adalah rasio K/L/P/K atau unit kerja eselon I/II di lingkungan K/L/P atau unit kerja setara di lingkungan Korporasi yang memenuhi tiga unsur kriteria yaitu:

- a. Mempunyai Daftar Risiko *Fraud* yang terungkap dari hasil kegiatan pembelajaran KPAK;
- b. Mempunyai rencana penanganan risiko *fraud* yang dibahas bersama dengan anggota KPAK;
- c. Mempunyai peraturan KLPK mengenai sistem pengaduan masyarakat/*whistleblowing*, atau belum mempunyai peraturan KLPK mengenai sistem pengaduan masyarakat/*whistleblowing* namun menyatakan kesediaannya untuk dilakukan bimtek pengembangan sistem pengaduan masyarakat/*whistleblowing*.

dibandingkan dengan KLPK atau unit kerja eselon I/II di lingkungan KLP atau unit kerja setara di lingkungan Korporasi yang telah menjadi anggota dari Komunitas Pembelajar Anti Korupsi.

Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah KLPK atau unit kerja eselon I/II di lingkungan KLP atau unit kerja setara di lingkungan Korporasi yang telah memenuhi tiga unsur kriteria dibandingkan dengan jumlah KLPK atau unit kerja eselon I/II di lingkungan KLP atau unit kerja setara di lingkungan Korporasi yang telah menjadi anggota dari Komunitas Pembelajar Anti Korupsi.

Sampai dengan triwulan II tahun 2017 belum ada realisasi.

e. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah di bidang keinvestigasian

IKU 5.1. Persentase auditor yang memiliki kompetensi keinvestigasian.

Persentase auditor yang memiliki kompetensi keinvestigasian yaitu kompetensi yang harus dimiliki oleh auditor investigatif meliputi pengetahuan dan keterampilan di bidang:

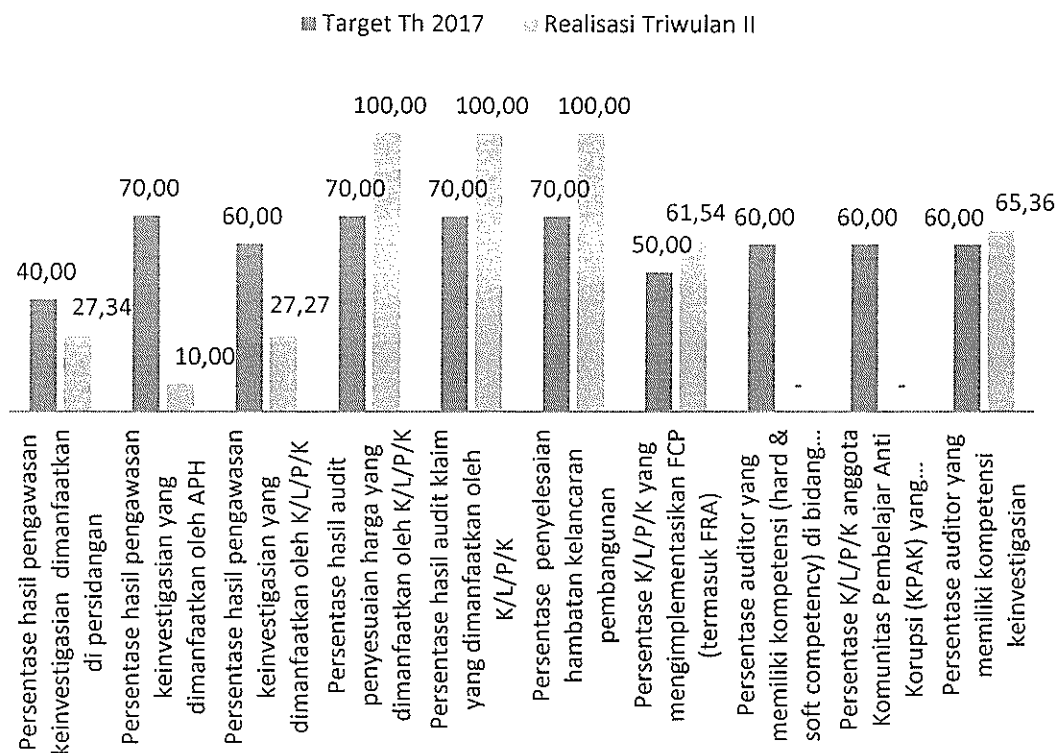
- 1) Hukum
- 2) Keuangan
- 3) Audit dan Akuntansi
- 4) Ekonomi
- 5) Penyelidikan
- 6) Komputer
- 7) Investigasi
- 8) Manajemen

Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah auditor yang mengikuti diklat dibandingkan dengan jumlah auditor yang ditargetkan untuk mengikuti diklat pada tahun 2017.

Realisasi kinerja triwulan II tahun 2017 sebesar 65,36% atau mencapai 108,93% dari target tahun 2017 sebesar 60%. Realisasi kinerja dihitung berdasarkan jumlah auditor yang mengikuti diklat di atas dibandingkan dengan jumlah auditor yang ditargetkan untuk mengikuti diklat yaitu 266 auditor dibandingkan 407 auditor.

Target dan realisasi program tersebut dapat digambarkan dengan grafik berikut:

Target dan Realisasi Program



B. Permasalahan dan Rencana Tindak

Dari gambar 1 terlihat sebanyak 4 (empat) indikator kinerja yang masih harus ditingkatkan kinerjanya karena belum mencapai target proporsional tahun 2017 sebesar 50% yaitu:

1. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian dimanfaatkan oleh APH.
2. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian dimanfaatkan oleh K/L/P/K.
3. Persentase auditor yang memiliki kompetensi (*hard & soft competency*) di bidang pencegahan.
4. Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat.

Rendahnya capaian pada 4 (empat) indikator kinerja tersebut disebabkan antara lain laporan hasil audit investigatif yang diserahkan kepada APH belum ditindaklanjuti dengan penyidikan, laporan hasil audit investigatif belum ditindaklanjuti oleh K/L/P/K, dan kegiatan pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) direncanakan akan dilaksanakan pada Semester II Tahun 2017.

C. Anggaran dan Realisasi Keuangan

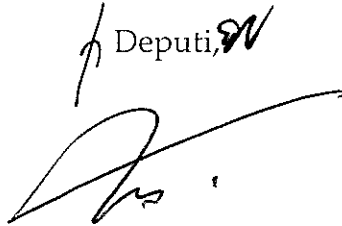
Anggaran Deputi Bidang Investigasi tahun 2017 sebesar Rp5.525.000.000,00. Pada triwulan II tahun 2017 telah terealisasi anggaran sebesar

Rp1.765.999.119,00 atau mencapai 31,96% dari anggaran sebelum *self blocking*, dengan rincian sebagaimana tabel 1.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Keuangan Deputy Bidang Investigasi
Triwulan II Tahun 2017

Pengawasan/ Non Pengawasan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan Dana (%)
	Sebelum <i>Self Blocking</i>	Tw II 2017	Sebelum <i>Self Blocking</i>
Pengawasan	4.250.000.000	1.185.975.031	27,91
Non Pengawasan	1.275.000.000	580.024.088	45,49
Jumlah	5.525.000.000	1.765.999.119	31,96

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Kepala BPKP, kami ucapkan terima kasih.

Deputi, 

Iswan Elmi
NIP 19600127 198102 1 001

Realisasi Outcome

Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		Realisasi s.d Trw. Ini	Capaian (%)	
			Tahun 2017	s.d. Trw. ini		Tahun 2017	s.d. Trw. ini
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
Sasaran Program 1. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian							
1	Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan	%	40	-	27,34	68,35	-
2	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	%	70	-	10,00	14,29	-
3	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	60	-	-	-	-
Sasaran Program 2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi							
1	Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan <i>Fraud Control Plan (FCP)</i> termasuk <i>Fraud Risk Assessment (FRA)</i>	%	50	-	61,54	123,08	-
2	Persentase auditor yang memiliki kompetensi (<i>hard and soft competency</i>) di bidang pencegahan	%	60	-	-	-	-
0							
1	Persentase KLPK yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat	%	60	-	-	-	-
Sasaran Program 4. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah di bidang keinvestigasian							
1	Persentase auditor yang memiliki kompetensi keinvestigasian	%	60	-	65,36	108,93	-
Jumlah							

Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		Realisasi s.d Trw. Ini	Capaian (%)	
			Tahun 2017	s.d. Trw. ini		Tahun 2017	s.d. Trw. ini
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
Sasaran Program 1. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian							
1	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian dimanfaatkan di persidangan	%	40	-	-	-	-
2	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	%	70	-	-	-	-
3	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	60	-	27,27	45,45	-
Sasaran Program 2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi							
1	Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	%	50	-	100,00	200,00	-
Sasaran Program 3. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah di bidang keinvestigasian							
1	Persentase auditor yang memiliki kompetensi keinvestigasian	%	60	-	-	-	-
Jumlah							

Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		Realisasi s.d Trw. Ini	Capaian (%)	
			Tahun 2017	s.d. Trw. ini		Tahun 2017	s.d. Trw. ini
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
Sasaran Program 1. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian							
1	Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	70	-	100,00	142,86	-
2	Persentase hasil audit klaim dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	70	-	100,00	142,86	-
3	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	70	-	-	-	-
	Jumlah	%	70	-	-	-	-
Sasaran Program 2. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional							
1	Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan	%	70	-	100,00	142,86	-
	Jumlah	%	70	-	-	-	-
Sasaran Program 3. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah di bidang keinvestigasian							
1	Persentase auditor yang memiliki kompetensi keinvestigasian	%	60	-	-	-	-
	Jumlah	%	60	-	-	-	-



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG INVESTIGASI
DIREKTORAT INVESTIGASI BUMN DAN BUMD**

Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120
Telepon: (021) 85910031 (*Hunting*); Faksimilie: (021) 85909777; e-mail: *investigasi@bpkp.go.id*

NOTA DINAS

Nomor : ND- 303/D5.02/2017

Kepada yth. : 1. Direktur Investigasi Instansi Pemerintah
2. Direktur Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan
Dari : Direktur Investigasi BUMN dan BUMD
Hal : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Deputi Bidang
Investigasi Bulan Juni 2017

Bersama ini kami sampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Deputi Bidang Investigasi sampai dengan Bulan Juni Tahun Anggaran 2017, dengan rincian:

No.	Kode	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	%	Target (%)
1	3670	PKAU	1.075.000.000	580.024.088	494.975.912	53.96	57.75
2	3679	Direktorat 2	1.340.000.000	316.079.696	1.023.920.304	23.59	50.00
3	3680	Direktorat 3	1.304.000.000	269.908.175	1.034.091.825	20.70	53.47
4	3681	Direktorat 1	1.606.000.000	599.987.160	1.006.012.840	37.36	51.19
		Jumlah	5.325.000.000	1.765.999.119	3.559.000.881	33.16	54.62

Realisasi sebesar Rp 1.765.999.119, terdiri dari:

- a. Sudah di SPP-kan = Rp 1.513.747.119
- b. Dalam proses SPJ = Rp 252.252.000

Selanjutnya rincian atas anggaran dan realisasi dana per sub kegiatan sampai dengan bulan Juni 2017, terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 Juli 2017

Direktur


Agustina Arumsari
NIP 19701109 199103 2 001

Tembusan Yth.:
Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi

Rekapitulasi Perkembangan Kasus LHAI Berindikasi TPK yang Diserahkan kepada Instansi Penyidik

Periode : 01 Januari 2017

Sampai dengan : 30 Juni 2017

<i>Perkembangan Kasus</i>	<i>Jumlah Kasus</i>	<i>Rupiah</i>	<i>USD</i>	<i>Nilai Temuan</i>	
				<i>FFr</i>	<i>Yen</i>
1. Penyelidikan	27	47.095.212.613,61	0,00	0,00	
3. Penyidikan	2	401.254.762,00	0,00	0,00	
8. Diputus	1	3.826.550.000,00	0,00	0,00	
TOTAL	30	51.323.017.375,61	0,00	0,00	

Laporan Hasil Pelaksanaan Fraud Control Plan (FCP)

Periode : 01 Januari 2017

Sampai dengan : 30 Juni 2017

Jenis Laporan	Nomor Laporan dan Tgl Laporan	Penwakilan	Obyek	Uraian
FCP (Bimtek)				
1.	LAP-354/PW32/5/2016	23 Desember 2016	Sulawesi Barat	FCP Bimbingan Teknis Fraud Control Plan (FCP) pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kabupaten Majene Tahun 2016
2.	LBA-684/PW17/5/2016	27 Desember 2016	Kalimantan Timur	Laporan Hasil Bimbingan Teknis Implementasi Fraud Control Plan (FCP) pada RSUD A.M. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara 1. Pembentukan dan Pedoman Tata Kerja Satuan Pengawas Intern (SPI) RSUD A.M. Parikesit. 2. Penyusunan rencana tindak (action plan) implementasi FCP telah dilakukan dengan hasil berupa Draft Dokumen Rencana Tindak FCP. 3. Penyusunan Pedoman Pengendalian Fraud RSUD A.M. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara
Sub Jumlah = FCP (Bimtek) (2 laporan)				
FCP (DA)				
1.	Lap-421/PW19/2016	21 Desember 2016	Sulawesi Tengah	Laporan Diagnostic Assessment Fraud Control Plan (FCP) di Lingkungan RSUD Ampana (RS tipe C) 1. Hasil Program evaluasi terhadap 10 atribut dikategorikan BELUM MEMADA) 2. Penilaian FRA dikategorikan BERISIKO dengan bobot tertimbang sebesar 0,71 3. Hasil penelitian questionnaire a. indeks persepsi pegawai atas eksistensi dan implementasi atribut FCP secara keseluruhan memperoleh rata-rata sebesar 2,07 dari nilai maksimal 6,0, secara keseluruhan belum mampu mengidentifikasi risiko2 kejadian berpotensi fraud b. risiko fraud berupa penjualan obat/bahan habis pakai oleh aknium di ruangan, risiko fraud terkait penerimaan dana pasien umum tanpa melalui kasir, risiko fraud terkait perijanaan dinas, risiko fraud berupa kehilangan alat kesehatan
2.	LAP-349/PW32/5/2016	22 Desember 2016	Sulawesi Barat	FCP Diagnostic Assessment Fraud Control Plan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu (BPM-PTSP) Kabupaten Majene Tahun 2016
3.	LBA-514/PW15/5/2016	23 Desember 2016	Kalimantan Tengah	FCP Sosialisasi dan Diagnostic Assessment Fraud Control Plan pada RSUD dr. Murjanti Sampit

* Jenis Laporan	Nomor Laporan dan Tgl Laporan	Perwakilan	Obyek	Uraian
4.	LDA-895/PW10/5/2016 27 Desember 2016	Jawa Barat	Laporan Hasil Diagnostic Assessment Fraud Control Plan pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon Tahun 2016	Penilaian terhadap keberadaan FCP Tidak Memadai dan sangat berisiko dengan nilai FRA 0,39 (Skor jawaban Ya < 0,50)
5.	LDA-923/PW10/5/2016 30 Desember 2016	Jawa Barat	Diagnostic Assessment Fraud Control Plan pada RSUD Kabupaten Bekasi Tahun 2016	Penilaian Program Evaluasi FCP atribut 1 s.d. 10 tidak memadai dengan skor keberadaan 0,11 dan Implementasi 0,19
<i>Sub Jumlah = FCP (DA) (5 laporan)</i>				
<i>FCP (Evaluasi)</i>				
1.	LHE-453/PW04/05/2016 28 Nopember 2016	Riau	FCP Hasil Evaluasi Atas Implementasi Fraud Control Plan (FCP) pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Siak	Penilaian Resiko Fraud sangat berisiko dengan nilai 0,39, penilaian dari atribut 2 dan 4 berisiko, sedangkan 8 atribut yang lain sangat berisiko 111111
<i>Sub Jumlah = FCP (Evaluasi) (1 laporan)</i>				
<i>FCP (Sosialisasi)</i>				
1.	lap-430/pw27/5/2016 03 Nopember 2016	Papua Barat	fcop Diagnostic Assessment Fraud Control Plan (FCP) di UPTD Samsat Manokwari pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016	
2.	LS-717/PW26/5/2016 19 Desember 2016	Papua	FCP Sosialisasi Fraud Control Plan (FCP) pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke	
3.	LS-618/PW20/5/2016 22 Desember 2016	Sulawesi Tenggara	Sosialisasi FCP pada RSUD Kabupaten Muna Tahun 2016	
4.	LGIAT-0536/PW01/5/2016 29 Desember 2016	Aceh	Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi Fraud Control Plan (FCP) pada RSUD Cut Nyak Dien Meulaboh Tahun 2016	
5.	Lap-30/PW24/5/2017 28 Februari 2017	Nusa Tenggara Timur	Sosialisasi FCP di Lingkungan RSUD S.K. Lerik Kota Kupang	
<i>Sub Jumlah = FCP (Sosialisasi) (5 laporan)</i>				
TOTAL				<div style="text-align: right;"> 8 13 </div>

Rekapitulasi LHA Eskalasi, Klaim dan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan

Periode : 01 Januari 2017

Sampai dengan : 30 Juni 2017

Jenis Laporan	Jumlah Laporan	Mata Uang	Usulan Rekanan	Usulan Panitia	Hasil Audit	Koreksi Audit
File (Eskalasi)	1	Rupiah :	0,00	0,00	0,00	0,00
		USD :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Yen :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Euro :	0,00	0,00	0,00	0,00
File (HKP)	2	Rupiah :	0,00	0,00	0,00	0,00
		USD :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Yen :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Euro :	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain	5	Rupiah :	0,00	0,00	0,00	0,00
		USD :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Yen :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Euro :	0,00	0,00	0,00	0,00
Non TPK (Eskalasi)	8	Rupiah :	83.357.736.145,06	49.834.839.723,11	42.519.263.003,55	7.315.576.719,56
		USD :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Yen :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Euro :	0,00	0,00	0,00	0,00
Non TPK (HKP)	6	Rupiah :	0,00	0,00	0,00	0,00
		USD :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Yen :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Euro :	0,00	0,00	0,00	0,00
Non TPK (Klaim)	14	Rupiah :	252.747.888.400,08	183.908.512.017,07	160.281.307.927,84	23.627.204.089,23
		USD :	14.598.533,00	7.452.263,00	7.369.098,60	83.164,40
		Yen :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Euro :	0,00	0,00	0,00	0,00

Jenis Laporan	Jumlah Laporan	Mata Uang	Usulan Rekanan	Usulan Panitia	Hasil Audit	Koreksi Audit
TOTAL	36	Rupiah :	336.105.624.545,14	233.743.351.740,18	202.800.570.931,39	30.942.780.808,79
		USD :	14.598.533,00	7.452.263,00	7.369.098,60	83.164,40
		Yen :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Euro :	0,00	0,00	0,00	0,00

Sil Audit Investigasi Non TPK, Tidak Terbukti dll.

01 Januari 2017

Sampai dengan : 30 Juni 2017

Nomor Laporan Tgl Laporan	Objek Pemeriksaan	Perwakilan	Departemen	Nilai Temuan (Rupiah)	Nilai Temuan (USD)	Nilai Temuan (Yen)	Instansi Peminta
1. LR-19/D602/2016 13 Desember 2016 lain-lain (1 laporan)	Laporan Hasil Reviu atas Pemanfaatan Tanah Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan PT Krakatau Industrial Estate Citegong	Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD	Krakatau Steel, PT	0,00	0,00	0,00	PT Krakatau Steel (Persero) ✓
1. LHATT-3/D502/2017 07 April 2017	Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu pada PT Sarinah (Persero)	Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD	PT Sarinah	0,00	0,00	0,00	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
2. LHATT-1/D5/02/2017 15 Maret 2017	Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Piutang, Persediaan dan Hutang pada PT Berdikari (Persero) Tahun 2012 s.d. 2015	Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD → AI	Berdikari, PT	0,00	0,00	0,00	Kementerian Badan Usaha Milik Negara ✓
3. SR-735/D6/02/2016 13 Oktober 2016	Laporan Hasil Reviu atas perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan nilai pekerjaan tambah EPC Blast Furnace pada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD	Krakatau Steel, PT	0,00	0,00	0,00	PT Krakatau Steel ✓
4. LAINV-522/D601/2016 28 Desember 2016	LHAI atas Dugaan Penyimpangan Pada Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) di Universitas Padjadjaran Bandung TA 2014	Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah	Departemen Kesehatan	4.662.119.565,00	0,00	0,00	Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI
5. LHATT-4/D5/02/2017 20 April 2017	Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Biaya Klaim Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia Tahun Buku 2015 dan 2016 Semester I yang bersumber dari Penanaman Modal Negara (PMN)	Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD → AI dikurinda	Perum. Jamkrindo	0,00	0,00	0,00	Menteri BUMN
6. LHATT-2/D502/2017 07 April 2017	Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pembayaran Klaim Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD → AI dikurinda	Asuransi Kredit Indonesia, PT	0,00	0,00	0,00	Kementerian BUMN

Nomor Laporan Tgl Laporan	Obyek Pemeriksaan	Perwakilan	Departemen	Nilai Temuan (Rupiah)	Nilai Temuan (USD)	Nilai Temuan (Yen)	Instansi Peminta
7. LHAJ-487/PW02/5/2016	LHAJ Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Rintisan Bantuan Operasional/Bantuan Operasional Sekolah (R-BOS/BOS) SMA Santo Thomas 3 Medan TA 2013-2015 (Semester I)	Sumatera Utara	Pemkot Medan	185.977.991,00	0,00	0,00	Wali Orangtua Siswa SMA 3 Santo Thomas 3 Medan
29 Agustus 2016							
8. LAINV-292/PW32/5/2016	Pembangunan Masjid Madaniah Pasangkayu pada Dinas Pendidikan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju Utara TA 2012-2015	Sulawesi Barat	Pemkab Mamuju Utara	17.616.151.167,00	0,00	0,00	Pemkab Mamuju Utara
21 Nopember 2016							
9. LHAJ-214/PW04/5//2016	LHAJ atas Dugaan Penyimpangan Proses Pelicangan Umum pada Pengadaan Barang yang Dananya Bersumber dari Bantuan Keuangan Prov Riau Kab Siak Bidang Pendidikan TA 2015	Riau	Pemkab Siak	0,00	0,00	0,00	Bupati Siak
13 Januari 2017							
10. LAINV-311/PW03/5/2016	LHAJ atas Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park	Sumatera Barat	Pemprov Sumatera Barat	0,00	0,00	0,00	Pemprov Sumbar
15 September 2016							
Non TPK (10 laporan)				22.464.248.723,00	0,00	0,00	
11 Laporan				22.464.248.723,00	0,00	0,00	

3
1

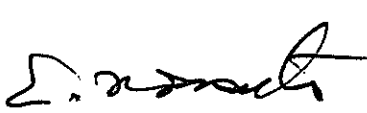



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG INVESTIGASI**

Jl. Pramuka No. 33 – Jakarta Timur, Telepon 021- 85906767)

Diterima oleh Redaktur :		Diterima di bagian Ketik :
Diselesaikan Oleh :	Ananta Singgih	Diketik oleh :
Diperiksa Oleh :	Ririn Mardianti Sutrisno	Diperiksa oleh :
Diterima oleh Bagian Arsip :		Dikirim Pada Tanggal :

Kemukakan Lagi Pada Tanggal :

Hal : Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Triwulan II Tahun 2017	Nomor Agenda :
Nomor : LKIN- 11 /D5/01/ 2017	19 Juli 2017
Nota : Direktur Investigasi Instansi Pemerintah  Ernadhi Sudarmanto NIP 19650704 198503 1 001	Memperhatikan :
Ditetapkan : Deputi Bidang Investigasi  Iswan Elmi NIP 19600127 198102 1 001	Yth. Kepala BPKP di Jakarta
Lampiran :	

Penjelasan : -